

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya manusia selalu menghasilkan sampah. Sampah ialah sisa atau residu dari suatu materi yang keberadaannya sudah tidak diinginkan kembali oleh manusia baik yang berskala individu, rumah tangga, maupun organisasi. Sampah merupakan sisa aktivitas keseharian manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat¹. Jumlah timbulan sampah yang diproduksi oleh suatu Negara atau daerah erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta pola konsumsi suatu masyarakat itu sendiri.

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi faktor munculnya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil sampah terbesar. Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang menempati posisi keempat terbanyak di dunia. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah sebesar 32,56 juta jiwa dari hasil sensus penduduk sebelumnya (BPS, 2020). Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada permasalahan lingkungan khususnya peningkatan volume sampah. Adapun total timbulan sampah Indonesia mencapai sekitar 67,8 juta ton/tahun, jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring laju pertumbuhan jumlah penduduk (KLHK, 2020).

¹ UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Faktor pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat juga turut berkontribusi terhadap jumlah timbulan sampah karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang salah satunya ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi akan memiliki pola konsumsi yang lebih tinggi sehingga sampah yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah (Hoornweg dan Bhada-Tata dalam Prajati, 2015: 40). Menurut data BPS (2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2017 sampai 2018 meningkat 0,10% namun pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi ini menyebabkan pola konsumsi masyarakat menjadi menurun sehingga produksi sampah yang dihasilkan ikut menurun. Hal serupa juga disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa pandemi Covid-19 membuat produksi sampah/hari di beberapa daerah menurun 10%-15% (Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen KLHK dalam CNN Indonesia, 2020). Namun, tetap terjadi peningkatan sampah dari sampah rumah tangga seperti plastik dan sisa makanan akibat lebih banyak melakukan aktivitas dirumah.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang termasuk dalam peringkat 20 besar sebagai penyumbang timbulan sampah terbanyak.

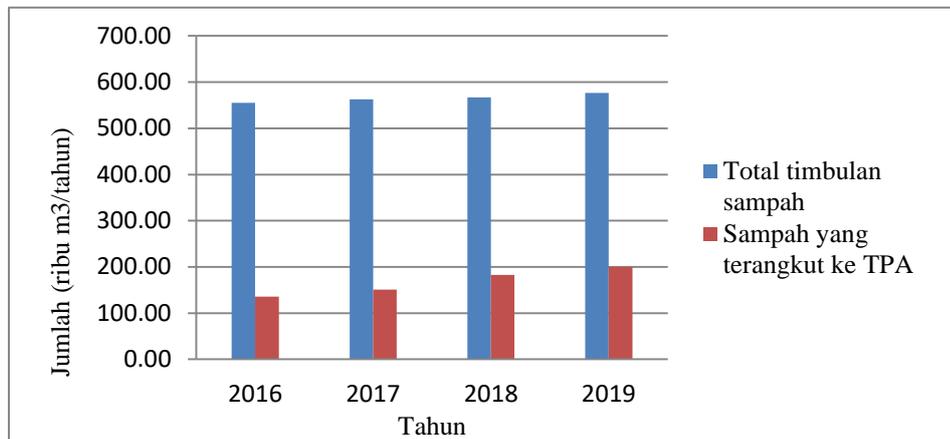
**Tabel 1. 1 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Menurut
Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)
1.	Getasan	51.759	77,6
2.	Tengaran	73.156	109,7
3.	Susukan	44.120	66,2
4.	Kaliwungu	26.658	40,0
5.	Suruh	60.426	90,6
6.	Pabelan	40.402	60,6
7.	Tuntang	67.273	100,9
8.	Banyubiru	43.811	65,7
9.	Jambu	39.911	59,9
10.	Sumowono	31.009	46,5
11.	Ambarawa	63.725	95,6
12.	Bandungan	58.463	87,7
13.	Bawen	64.652	97,0
14.	Bringin	43.535	65,3
15.	Bancak	20.099	30,1
16.	Pringapus	59.423	89,1
17.	Bergas	90.258	135,4
18.	Ungaran Barat	88.818	133,2
19.	Ungaran Timur	86.288	129,4
Jumlah		1.053.786	1.580,7

Sumber : IKPLH Kabupaten Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kabupaten Semarang memiliki perkiraan timbulan sampah sebesar 1.580,7m³/hari. Adapun salah satu kecamatan yang memberikan kontribusi timbulan sampah terbanyak yaitu Kecamatan Ungaran Barat sebesar 133,2 m³/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 88.818

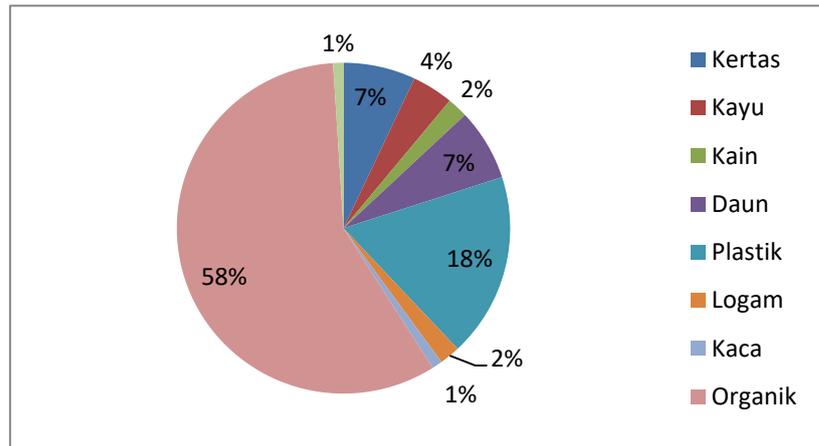
jiwa. Namun besarnya timbulan sampah yang dihasilkan belum diikuti dengan pengelolaan sampah yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Volume Sampah dan Total Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019

Sumber: Laporan Utama IKPLH Kabupaten Semarang Tahun 2019

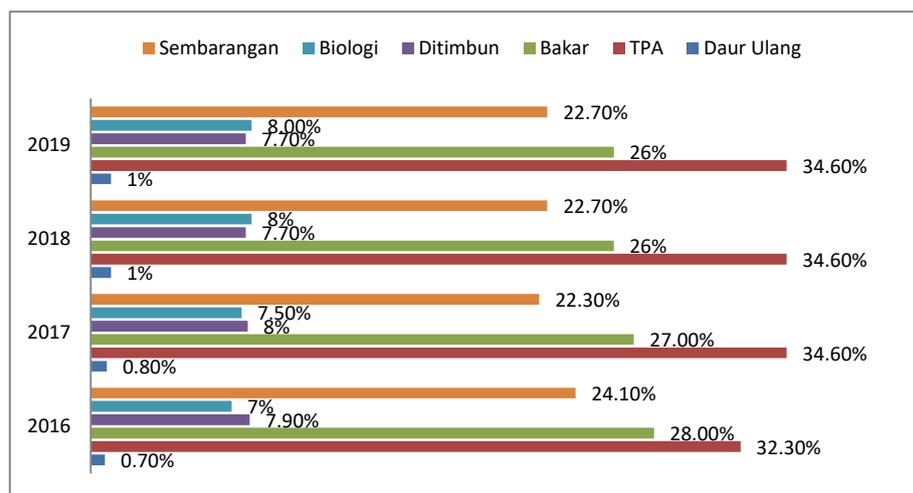
Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa, timbulan sampah di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 timbulan sampah di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 576.947,84 m³/tahun, sedangkan sampah yang dapat ditangani atau terangkut ke TPA hanya 199.717,7 m³/tahun atau 34,61%. Presentase pengangkutan sampah ini masih jauh dari target SPM yang ditetapkan DLH Kabupaten Semarang yaitu 70% sampah terangkut.



Gambar 1. 2 Presentase Komposisi Sampah di Kabupaten Semarang Tahun 2019

Sumber: Laporan Utama IKPLH Kabupaten Semarang Tahun 2019

Dilihat dari komposisi sampah di Kabupaten Semarang (2019) masih didominasi oleh sampah organik sebesar 57,54% dan sampah plastik berada diposisi kedua yaitu sebesar 18,18%. Sampah plastik hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari karena memiliki harga yang relative murah, ringan dan tidak mudah rusak. Namun, sampah plastik bersifat *non-biodegradabel* sehingga menjadikannya sebagai kontributor limbah terbesar yang merusak lingkungan (Asia & Arifin dalam Septiani, 2018).



Gambar 1. 3 Distribusi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019

Sumber: Laporan Utama IKPLH Kabupaten Semarang Tahun 2019

Pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang berdasarkan gambar diatas diketahui masih bertumpu pada pengumpulan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu sebesar 34,6%, sementara sampah yang dikelola dengan cara di daur ulang memiliki angka presentase paling rendah yaitu 1,0%. Besarnya sampah yang dibuang ke TPA menunjukan bahwa kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah (Coskun, 2020). Padahal pengelolaan sampah yang dominan berakhir di TPA akan menyebabkan inefisiensi karena akan membutuhkan lahan yang semakin luas, biaya *maintenance* semakin meningkat, jalur pengangkutan menjadi lebih panjang, serta membutuhkan jumlah tenaga dan fasilitas pengangkutan sampah yang lebih banyak untuk mengakomodir sampah-sampah di TPS. Timbulan sampah di Kabupaten Semarang bahkan telah menyebabkan 75% dari 164 tempat pembuangan sampah (TPS) mengalami *overload* (Mukti, 2020). Timbulan sampah organik di TPA juga akan mengalami dekomposisi *anaerobic* yang menghasilkan gas metana dan berkontribusi terhadap pemanasan global.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang juga terlihat dari tingginya angka pembakaran sampah yaitu sebesar 26%. Disisi lain, jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik atau dibuang pada tempat yang tidak semestinya seperti di kawasan pemukiman, perkebunan, pekarangan, tepi jalan, badan sungai dan sebagainya juga tercatat memiliki angka presentase yang besar yaitu 22,7%. Tumpukan sampah apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menyebabkan pencemar air, tanah maupun udara yang dapat memberikan dampak *negative* bagi kesehatan, lingkungan dan sosial.

Kecenderungan ini diperparah dengan perkembangan aktivitas kota yang semakin padat serta semakin menurunnya daya dukung alam.

Melihat permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Semarang, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan atau kesediaan masyarakat dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting untuk menciptakan pengelolaan sampah yang menyeluruh sehingga kesadaran masyarakat perlu ditumbuh kembangkan mulai dari stuktur terendah yaitu lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengamanahkan pentingnya tranformasi paradigma pengelolaan sampah dari sistem kumpul-angkut-buang perlu dirubah menjadi pengelolaan yang berfokus pada upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Peran atau partisipasi masyarakat di Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2014 pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta pada proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan Pemerintah Daerah. Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak

dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup².

Bentuk partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang salah satunya diwujudkan melalui program bank sampah. Bank sampah yaitu salah satu fasilitas pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah daerah³. Bank sampah bersifat *social engineering* dengan maksud untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah. Prosedur pelaksanaan bank sampah oleh masyarakat mencakup proses pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga menurut jenisnya yaitu sampah organik, anorganik dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Konsep pendekatan pemilahan sampah ini berusaha memposisikan masyarakat sebagai pihak utama dalam pengelolaan sampah, sedangkan peran pemerintah hanya sebatas fasilitator untuk menumbuhkan rasa keterikatan dan tanggung jawab masyarakat. Sampah-sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke bank sampah. Pada bank sampah, pengurus atau petugas akan melakukan penimbangan dan pencatatan sampah, kemudian hasil penimbangan nantinya akan dicatat pada buku tabungan bank sampah. Bank sampah dimaksud untuk mewujudkan lingkungan yang,

² Perda Kabupaten Semarang Nomer 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Permen LHK RI Nomer 14 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

bersih, sehat, hijau, serta dapat memberikan manfaat ekonomi (Wintoko dalam Arifin 2017: 6).

Kabupaten Semarang pada tahun 2020 memiliki 161 lembaga bank sampah, baik yang berasal dari binaan instansi, swadaya masyarakat, maupun mandiri (Silopah Kabupaten Semarang, 2020). Melalui bank sampah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah karena pengelolaan sampah sudah dapat dilakukan secara langsung dari sumbernya, akan tetapi pengelolaan sampah pada Bank Sampah khususnya di Kecamatan Ungaran Barat belum mampu mencapai target pengurangan sampah yang terangkut ke TPA. Dimana pengurangan sampah melalui bank sampah baru mencapai 22% dari target 30-40% (Silopah Kabupaten Semarang).

Kelurahan Langensari dalam hal ini tercatat sebagai salah satu daerah di Kecamatan Ungaran yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 9.594 jiwa (BPS, 2020). Banyaknya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah yang ada di daerah tersebut. Adapun bank sampah pertama yang ada di Kelurahan Langensari adalah Bank Sampah Apik Amanah sebagai wujud keprihatinan Ibu-Ibu PKK akan permasalahan sampah yang terjadi di sekitar lingkungan. Harapannya, melalui program ini masyarakat akan lebih sadar dan peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan ikut mengelola sampah. Namun, peran Bank Sampah Apik Amanah ternyata belum dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPS secara maksimal. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah masih rendah. Masyarakat masih banyak yang belum berpartisipasi

sebagai nasabah. Dimana dari 2.224 penduduk baru 65 atau 2,92% penduduk yang menjadi nasabah bank sampah. Rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai nasabah ini mengindikasikan bahwa perilaku dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan 3R masih minim.

Partisipasi masyarakat yang rendah juga dapat disebabkan karena kurang baiknya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Dilihat dari komposisi penduduk di RW 05 Kelurahan Langensari berdasarkan tingkat pendidikannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah dan tamatan SD masih tinggi yaitu sebesar 690 jiwa atau 31,02 % (Kelurahan Langensari, 2022).

Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah juga diduga masih terhambat karena keterbatasan sarana prasaranan, yaitu terkait bangunan bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah di RW 05 Kelurahan Langensari yang masih meminjam. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah menjadi terbatas karena khawatir bangunan tersebut akan di gunakan kembali oleh pemiliknya. Padahal sarana pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah (Yuliana, 2019).

Selama pandemi Covid-19 kegiatan pengelolaan sampah pada beberapa bank sampah di Kabupaten Semarang tidak terkecuali pada Bank Sampah Apik Amanah juga sempat terhenti karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah karena adanya rasa takut untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain apalagi berkaitan dengan sampah sebagai sumber penyakit.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari, Kabupaten Semarang”.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Timbulan sampah di Kabupaten Semarang terus bertambah.
2. Sampah memberikan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan sosial.
3. Pengelolaan sampah yang dilakukan belum sebanding dengan sampah yang dihasilkan.
4. Bank Apik Amanah dibentuk guna mengatasi permasalahan sampah, namun partisipasi masyarakat diduga belum optimal sebagai berikut:
 - a. Jumlah nasabah bank sampah masih rendah.
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan yang masih rendah dan keterbatasan sarana prasarana bank sampah.
 - c. Pandemi menyebabkan kegiatan bank sampah sempat terhenti.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang?

2. Apasaja faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dan mampu memberikan sumbangsih terhadap kajian ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang dan pengelola Bank Sampah Apik Amanah dalam pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan bagi pembacanya dan dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan tugas akhir Pendidikan S1 Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Bank sampah adalah pendekatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang terus diupayakan pemerintah sebagai langkah mengantisipasi peningkatan volume sampah. Berikut akan dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah.

Alfian Dimas Prastiyantoro (2017), dalam penelitiannya menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Bantul Yogyakarta serta menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, menggunakan masing-masing 3 orang informan yang berasal dari pengurus dan nasabah bank sampah. Hasil studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terkait pengelolaan bank sampah pada penelitian ini didasarkan pada keinginan pribadi serta adanya dorongan pihak luar (teman maupun pengurus bank sampah). Pada tahap perencanaan, partisipasi anggota maupun nasabah bank sampah masih minim. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan terdapat mekanisme *take and give* antara pihak bank sampah dengan anggota yaitu tingkat *partnership* serta terdapat partisipasi dalam bentuk pemikiran, barang maupun keahlian. Adapun faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat yaitu faktor pengetahuan, faktor keyakinan serta faktor prinsip insentif dan manfaat.

Sejalan dengan penelitian diatas, Kiki Pamilutseh, dkk (2020) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada program Bank Sampah Nuruh Hikmah di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong Tegal beserta keberlanjutannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 50 responden. Hasil studi menunjukkan bahwa anggota bank sampah cukup berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, namun pada tahap perencanaan dan evaluasi masih kurang. Faktor yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yaitu tingkat pendidikan nonformal, dukungan pemerintah, pengadaan sarpras, serta perolehan

insentif. Dan partisipasi masyarakat berhubungan dengan keberlanjutan kegiatan bank sampah.

Penelitian lain yang ditulis oleh Aditya Nugraha (2018), menganalisis tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada bank sampah di Jakarta Selatan. Variabel yang diamati terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan survei sedangkan pengelolaan data menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman dan Uji Chi Square. Hasil studi ini menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi positif dan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ditunjukkan dari keikutsertaan masyarakat sebagai nasabah dimana setiap harinya mereka melakukan pengelolaan sampah basah dan setiap 2 minggu sekali melakukan penimbangan sampah kering. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara faktor eksternal dan internal dengan persepsi masyarakat. Serta persepsi masyarakat memiliki korelasi signifikan dengan partisipasi masyarakat.

Penelitian lain yang ditulis oleh Shafiera Amalia (2020), menganalisis tentang faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat pada program bank sampah di Kota Yogyakarta. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui *in-depth interview*, observasi dan studi pustaka. Studi ini menunjukkan bahwa dari 129.252 KK di Kota Yogyakarta hanya 14,6% KK yang menjadi nasabah bank sampah. Kecamatan yang memiliki proporsi nasabah terbanyak berada di Kecamatan Jetis dan Mergangsan sedangkan nasabah terkecil berada di Kecamatan Gedongtengan. Adapun faktor utama penghambat partisipasi

masyarakat yaitu belum optimalnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran dan motivasi individu, dan kurang bervariasinya yang insentif diberikan.

Sejalan dengan penelitin diatas, Fitriza Yuliana (2017), dalam penelitiannya menganalisis tentang partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah pemukiman di Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menganalisis faktor apa sajakah yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan, pendidikan, luas halaman, kondisi lingkungan, sikap/ perilaku serta persepsi masyarakat. Pada studi ini partisipasi masyarakatnya masih tergolong rendah, yaitu sebesar 56%. Terdapat hubungan yang positif antara karakteristik masyarakat dan lingkungan tempat tinggal dengan tingkat partisipasi yang diberikan dalam pengelolaan sampah sedangkan faktor yang tidak berhubungan yaitu lama tinggal masyarakat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ina Yuliana (2019), penelitiannya menganalisis tentang partisipasi masyarakat pada program bank sampah di Kecamatan Ungaran Barat. Jenis penelitian *observasional analitik* dipakai dalam penelitian ini menggunakan 100 sampel penelitian dengan teknik *proportional sampling* dan teknik analisis uji *chi square*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kaitan antara partisipasi masyarakat dengan sikap, pengetahuan, perilaku, fasilitas pemilah sampah, dan manfaat yang diberikan bank sampah. Sementara faktor yang tidak berhubungan dengan yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, serta tersediannya lahan. Penelitian ini juga menyarankan pengelola bank sampah agar lebih giat mengajak masyarakat untuk

turut berpartisipasi dalam pemilahan sampah serta pengelola dapat berkerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Shanaz Vindi Setyarini (2020), menganalisis tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah Soka Resik Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah mampu mengurangi volume sampah di TPA. Dalam hal ini pemerintah daerah telah memberikan dukungan berupa edukasi, pendampingan, pembinaan hingga monitoring dan bantuan sarpras bank sampah. Keberadaan bank sampah Soka Resik mampu memberikan dampak yang signifikan pada aspek lingkungan, akan tetapi pada aspek ekonomi dan sosial perlu ditingkatkan. Saran peneliti yaitu diperlukan edukasi secara berkelanjutan dan persisten untuk merubah pola pikir masyarakat secara massif, pengajuan bantuan kepada Lembaga Non-Pemerintah serta pembentukan UMKM yang menjual produk hasil kegiatan *recycle*.

Penelitian lainya ditulis oleh Mucahit Coskun (2020), dalam penelitiannya menganalisis artikel periode 2008-2018 tentang edukasi pengelolaan sampah dari jurnal campuran situs Scopus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan investigasi kritis pada artikel tentang pendidikan pengelolaan sampah di mana dari total 172 artikel, teridentifikasi 70 artikel dihubungkan dengan topik penelitian. Hasil analisis mengungkapkan bahwa kurangnya perhatian dan penekanan yang diberikan pada 3R dan TPA memiliki persentase sebesar 2,90% dari 66 artikel. Oleh karena itu, esensi pengurangan sampah melalui edukasi

pengelolaan sampah perlu ditingkatkan serta perlu diakui dan dimulainya aturan serta kegiatan tentang pengurangan sampah. Kesadaran dan antusias masyarakat, serta kegiatan dan dorongan untuk melakukan pengelolaan sampah menempati posisi penting sebagai cara meminimalkan bahan yang dibuang. Studi ini secara signifikan didasarkan pada kesimpulan, sehingga membutuhkan lebih banyak makalah dan penelitian lebih lanjut dari berbagai komunitas akademik dalam konteks.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sunarti (2021), dalam penelitiannya menganalisis tentang faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan yaitu tinjauan pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor instrinsik berupa pengaturan pendidikan bagi warga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pengelolaan sampah didukung dengan faktor ekstrinsik yang mengarah pada perubahan perilaku. Studi ini mengidentifikasi delapan jenis konten utama yang dibagikan di pengaturan pendidikan untuk memastikan peningkatannya. Faktor intrinsik utama yang harus dikembangkan, termasuk enam jenis pengetahuan dan lima faktor domain emosional. Enam jenis pengetahuan meliputi pengalaman teknis, kinerja pengelolaan sampah pengetahuan, persepsi manfaat, kesadaran lingkungan, pemahaman tentang tanggung jawab individu dan sosial, serta pemahaman norma dan peraturan sosial. Sedangkan lima faktor intrinsik dalam domain emosional meliputi kemandirian lingkungan, motivasi, norma dan moral individu, persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioural control/PBC*), dan sikap terhadap pengelolaan sampah. Semua faktor baik intrinsik maupun

ekstrinsik harus saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan perilaku warga yang mengarah pada partisipasi berkelanjutan.

Penelitian yang sama juga ditulis oleh Ying Ma dkk (2020), mengeksplorasi tentang nilai persepsi yang mempengaruhi perilaku pemilahan sampah rumah tangga di pedesaan Cina berdasarkan teori maksimisasi utilitas dari ekonomi rasional. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data survei dari 688 rumah tangga petani di tiga kota dan tiga kabupaten Provinsi Shaanxi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor nilai biaya dan manfaat yang dirasakan mempengaruhi partisipasi petani dalam pemilahan sampah. Manfaat spiritual memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku pemilahan sampah, sedangkan biaya waktu, biaya fisik, dan biaya material dari biaya yang dirasakan memiliki pengaruh negative pada perilaku pemilahan sampah. Studi lebih lanjut menunjukkan heterogenitas dampak pendapatan biaya waktu hanya berpengaruh signifikan terhadap klasifikasi kelompok tani berpenghasilan tinggi, sedangkan manfaat spiritual dan biaya belajar hanya mempengaruhi kelompok tani berpenghasilan rendah. Biaya material memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan tinggi dan rendah kelompok.

Penelitian yang sama juga dilakukan Nachalida Yukalang (2017), menganalisis tentang hambatan dalam efektifitas manajemen limbah padat kota pada daerah urbanisasi di Thailand. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui *in-depth interview*, observasi dan FGD. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor internal maupun eksternal sama-sama berperan dalam *Municipal Solid Waste Management* (MSWM). Dalam hal ini terdapat kebijakan

yang baik dan anggaran yang cukup. Namun terdapat hambatan seperti tidak memadainya infrastruktur, lemahnya perencanaan strategis, pengelolaan sampah yang tidak teratur dan sistem pemungutan biaya, buruknya komunikasi antara pemerintah kota dan penduduk serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah. Adanya dukungan eksternal dari pemerintah dan universitas terdekat diharapkan memperbaiki penanganan limbah. Temuan ini akan membantu menginformasikan pembuat keputusan kota, yang mengarah ke pengelolaan sampah kota yang lebih baik di baru daerah perkotaan.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Teori dan Metode	Hasil Penelitian
1	Alfian Dimas Prastiyantoro (2017)	Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Bantul Yogyakarta serta menganalisis faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasinya.	Teori: Partisipasi Masyarakat Metode: kualitatif	Partisipasi masyarakat dilatarbelakangi adanya keinginan pribadi serta dorongan dari pihak luar. Pada tahap pelaksanaan kegiatan terdapat mekanisme <i>take and give</i> yaitu tingkat <i>partnership</i> serta terdapat partisipasi dalam bentuk pemikiran, barang maupun keahlian. Namun partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih terbatas. Faktor pengetahuan, keyakinan serta prinsip insentif dan manfaat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada studi ini.
2	Kiki Pamilutsih dkk (2020)	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan menganalisis keberlanjutan pengelolaan bank di	Teori: Tahapan Partisipasi menurut Cohen dan	Partisipasi anggota Bank Sampah Nurul Hikmah cukup baik, namun pada tahap perencanaan dan evaluasi yang

		Desa Tuwel, Kecamatan Bojong Tegal.	Uphoff (1980) serta 3 prinsip keberlanjutan program menurut Utami et al. (2008) Metode: kuantitatif	dilibatatkan hanya pengurus bank sampah sehingga masyarakat masih kurang berpartisipasi. Faktor berupa tingkat pendidikan, dukungan pemerintah, ketersediaan sarpras serta adanya insentif memengaruhi partisipasi masyarakat dan hal ini berkaitan dengan keberlanjutan aktivitas pengelolaan sampah.
3	Aditya Nugraha (2018)	Menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah di kawasan Jakarta Selatan.	Teori: Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Metode: kuantitatif	Secara keseluruhan persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan angka yang positif dan partisipasi masyarakatnya tinggi hal ini ditunjukkan dari partisipasi nasabah dalam pengelolaan sampah basah yang dilakukan setiap hari dan penimbangan sampah kering setiap 2 minggu sekali secara berkelanjutan. Dan persepsi masyarakat berhubungan dengan faktor internal dan eksternal individu.
4	Shafiera Amalia (2020)	Menganalisis faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat pada program bank sampah di Kota Yogyakarta.	Teori: Partisipasi Masyarakat Metode: kualitatif	Partisipasi masyarakat masih rendah disebabkan oleh faktor internal (belum optimalnya pengetahuan, kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat tentang pengelolaan sampah) dan faktor eksternal (kurang bervariasinya insentif yang diberikan)

5	Fitriza Yuliana (2017)	Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman di Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya.	Teori: Partisipasi Masyarakat Metode: Kualitatif	Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Dalam hal ini faktor tingkat pendapatan, pendidikan, luas halaman, kondisi lingkungan, sikap serta persepsi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi yang diberikan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan karakteristik lama tinggal tidak berhubungan dengan partisipasi masyarakat.
6	Ina Yuliana (2019)	Menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kecamatan Ungaran Barat.	Teori: Partisipasi masyarakat Metode: Kuantitatif (desain penelitian <i>cross sectional</i>)	Pada program bank sampah, partisipasi masyarakat erat hubungannya dengan pengetahuan, sikap, perilaku, fasilitas, dan manfaat yang diberikan, sedangkan faktor pendidikan, pekerjaan, serta ketersediaan lahan tidak berhubungan dengan partisipasinya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 4 kecamatan di Kabupaten Semarang yang memiliki proporsi responden dengan tingkat pengetahuan tidak baik terbanyak berada di Bank Sampah Soka Resik.
7	Shanaz Vindi Setyarini (2020)	Menganalisis tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah Soka Resik Kabupaten Semarang.	Teori: Evaluasi kebijakan dengan perspektif <i>sustainable development</i> menurut	Implementasi program bank sampah mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA. Pemerintah daerah dalam hal ini telah memberikan dukungan berupa edukasi,

			United Nation Metode: Kualitatif (perspektif evaluasi kebijakan.)	pendampingan, pembinaan serta monitoring dan sarana prasarana kepada masyarakat. Keberadaan bank sampah Soka Resik mampu memberikan dampak yang signifikan pada aspek lingkungan, namun pada aspek sosial dan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
8	Mucahit Coskun (2020)	Menganalisis artikel periode 2008 hingga 2018 tentang edukasi pengelolaan sampah dari jurnal campuran situs Scopus.	Teori: Pengelolaan Sampah (Edukasi) Metode: <i>Literature review</i>	Edukasi tentang pengelolaan sampah memiliki peran penting untuk mengurangi volume sampah sehingga harus terus ditingkatkan untuk mendorong dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir bahan yang dibuang.
9	Sunarti (2021)	Menganalisis faktor intrinsik dan ekstrinsik yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.	Teori: Partisipasi Masyarakat (Edukasi) Metode: <i>Literature review</i>	Pendidikan menjadi salah satu faktor ekstrinsik yang sangat penting untuk meningkatkan faktor instrinsik pada tingkat emosional dan pengetahuan warga untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pendidikan tentang pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan teknik dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduknya agar pembelajaran dapat bertahan lama dan berkelanjutan.
10	Ying Ma dkk (2020)	Menganalisis nilai persepsi yang mempengaruhi perilaku	Teori: <i>Utility Maximization</i>	Faktor nilai biaya dan manfaat berhubungan dengan partisipasi

		memilah sampah rumah tangga di pedesaan Cina	(ekonomi rasional) Metode: Kuantitatif	masyarakat (petani) dalam kegiatan pemilahan sampah. Manfaat spiritual memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku pemilahan sampah, sedangkan nilai biaya (waktu, fisik, material, dll) memiliki pengaruh <i>negative</i> pada perilaku memilah sampah. Dampak persepsi pemilahan sampah pada tingkat pendapatan berbeda juga memiliki persepsi berbeda.
11	Nachalida Yukalang (2017)	Menganalisis hambatan dalam efektifitas manajemen limbah padat kota pada daerah urbanisasi di Thailand	Teori: Manajemen Sampah Perkotaan Metode: Kualitatif	Pengelolaan sampah perkotaan masih dihadapkan pada permasalahan seperti tidak memadainya infrastruktur, lemahnya perencanaan strategis, pengelolaan sampah tidak teratur, buruknya komunikasi antara pemerintah dengan warga serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah. Sehingga diperlukan dukungan dari pihak eksternal untuk memperbaiki penanganan sampah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ina Yuliana (2019) yaitu menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kecamatan Ungaran Barat. Namun perbedaanya dengan

penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah penelitian akan lebih di fokuskan untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilihat dari bentuk dan tingkat atau derajat partisipasi masyarakat pada salah satu Bank Sampah di Kecamatan Ungaran Barat yaitu Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari yang menurut penelusuran peneliti belum ada yang secara spesifik mengulas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta upaya untuk meningkatkan partisipasinya. Selain itu metode penelitian kualitatif akan digunakan pada penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ina Yuliana (2019) yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif juga dipilih karena penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih didominasi dengan metode kuantitatif.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” artinya “*to serve*” atau melayani/memenuhi. Pasolong (dalam Faturani, 2017:13) mengartikan administrasi sebagai jenis pekerjaan yang telah direncanakan untuk dikerjakan sekelompok orang melalui kerjasama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan rasional. Tujuan dari kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan skill berkerja secara efektif dan efisien melalui perbuatan yang rasional.

Administrasi merupakan proses keseluruhan aktivitas pada suatu organisasi yang ditujukan pada pencapaian tujuan/*goals and objectives* (Anggara,

2016:13). Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya administrasi diantaranya adanya sekelompok orang (terdiri atas beberapa orang yang sepakat untuk bekerjasama dengan tujuan yang sama), kerja sama (serangkaian aktivitas yang dikerjakan secara bersama secara terstruktur atau teratur) dan tujuan atau *goal* (nilai yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik materiil/fisik maupun mental spiritual).

Dunsire mengungkapkan bahwa administrasi adalah suatu arahan, perintah, implementasi, *direction*, penciptaan prinsip dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, aktivitas analisis, menyeimbangkan dan menginterpretasikan keputusan, pertimbangan kebijakan, suatu pekerjaan bagi individu maupun kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa publik(dalam Yermias, 2014:2).

Siagian (dalam Anggara, 2012), administrasi adalah suatu keseluruhan proses implementasi atas suatu keputusan yang biasanya dilaksanakan dua orang atau lebih guna pencapaian dari suatu tujuan tertentu. Chandler dan Plano (dalam Yermias, 2014:3) mengartikan administrasi sebagai suatu proses pengorganisir dan pengkoordinasian sumberdaya yang ada untuk kemudian diformulasikan, diimplementasikan serta dikelola menjadi sebuah keputusan melalui penetapan kebijakan publik. Chandler dan Plano juga mengartikan administrasi publik sebagai seni (*art*) dan ilmu (*science*) yang diarahkan untuk mengelola *public affairs* serta menjalankan tugas-tugas yang telah diterapkan. Sedangkan adminitrasi publik sebagai disiplin ilmu, bermaksud untuk menyelesaikan suatu

persoalan-persoalan publik melalui upaya pembaharuan maupun penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, SDM dan moneter.

Administrasi publik merupakan proses yang berkenaan dengan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, pengarahan kompetensi, dan penggunaan teknik tertentu, pengarahan terhadap usaha dari sejumlah orang. Administrasi publik bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih pada hubungan antara pemerintah dengan publik dan berupaya meningkatkan responsibilitas terhadap tuntutan publik dan melembagakan penerapan manajerial agar tercipta dengan efektif, efisien dan rasional (Yuniningsih, 2019:1).

Thoha (2008:94), Administrasi Publik ialah suatu kajian sistematis yang memuat perencanaan atas berbagai upaya penataan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Administrasi publik merupakan suatu proses untuk memformulasikan, mengimplementasikan berbagai kebijakan maupun program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta efisiensi dalam pencapaian tujuan negara. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro mengemukakan bahwa "*Public Administration is cooperative group effort in public setting. Public Administration covers all three branches: executive, legislative and yudicative, and their interrelationships*" (dalam Tahir, 2014:3). Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan suatu kerjasama kelompok di lingkup pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, Administrasi Publik didefinisikan sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

sekelompok orang maupun lembaga tertentu dalam merumuskan, mengimplementasikan dan pengelolaan keputusan-keputusan berkaitan dengan kebijakan publik dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "*to manage*" yang diartikan sebagai mengelola, mengatur, dan mengendalikan sesuatu. Setiap organisasi pasti membutuhkan manajemen karena manajemen menjadi hal penting dalam pencapaian tujuan.

Manajemen ialah suatu ilmu dan seni yang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hasibuan dalam Hariani, 2013:8). Sedangkan Mary Parker Follett (dalam Hariani, 2013:6) mengartikan manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Maksudnya, dalam mencapai tujuan manajer dapat menggunakan perantara orang lain untuk menyelesaikan tugas tertentu tanpa harus melakukan tugas itu sendiri.

Donavan dan Jackon (dalam Yeremias, 2014: 92) berpendapat bahwa manajemen adalah kegiatan yang dilakukan pada organisasi sebagai serangkaian *skill* dan tugas tertentu. Menurut Sharfitz dan Russel (dalam Yeremias, 2014: 92) mengartikan manajemen adalah suatu proses yang berkaitan dengan orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan organisasi melalui pendayagunaan sumberdaya manusia maupun mesin dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Manajemen publik bukanlah *scientific management* dan *policy analysis* ataupun “administrasi publik baru” dan bukan pula kerangka yang lebih baru, melainkan merefleksikan atau menggambarkan tekanan antara orientasi *rational-instrumental* dengan orientasi politik (Overman dalam Yeremias, 2014: 92). Harbani Pasolong (2007) mendefinisikan manajemen publik sebagai studi interdisipliner dari berbagai aspek umum pada organisasi sebagai penggabungan fungsi manajemen dengan sumberdaya, informasi serta politik di lain sisi.

Suradinata mendefinisikan manajemen publik sebagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemanfaatan sumber-sumber yang dikuasai Negara (Anggara, 2016:553). Manajemen publik dalam hal ini diartikan sebagai manajemen pemerintah, sebab manajemen publik secara umum adalah usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik melalui pemanfaatan sarana prasarana yang ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dengan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Adapun salah satu sumber daya yang harus dimiliki untuk mengelola suatu organisasi khususnya pada penelitian ini berkaitan dengan organisasi sosial yaitu bank sampah adalah sumber daya manusia manusia (partisipasi masyarakat) sebagai penggerak atau pelaku utama yang akan menentukan arah keberjalanan kegiatan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan faktor pendukung partisipasinya serta meminimalisis faktor penghambat. Pada penelitian juga

diketahui bahwa posisi pengelolaan sampah pada bank sampah termasuk ke dalam paradigma *New Public Service* (NPS) yang lebih berfokus pada *citizen right based* sebagai salah satu bagian dari hak warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini sejalan dengan perkembangan konsep *good governance*.

1.5.4 Sampah

Sampah atau *waste* merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang sudah tidak diinginkan lagi. Sampah sebagai salah satu jenis biomassa yang keberadaanya semakin hari semakin besar terutama di kota-kota besar. Sampah menurut Suryati dalam Arifin (2017) adalah sisa material dari suatu proses tertentu yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Suryani (2014), sampah diartikan sebagai limbah atau bahan buangan dalam bentuk padat maupun setengah padat sebagai akibat dari aktivitas perkotaan maupun kehidupan makhluk hidup (manusia, tumbuhan dan hewan). Sampah merupakan residu atau bahan yang telah mengalami perlakuan tertentu sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomi maupun sosial yang dapat menyebabkan pencemaran dan mengurangi kebersihan lingkungan.

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan sebagai suatu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang bentuknya padat. Sedangkan WHO mendefinisikan sampah sebagai suatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak diinginkan maupun segala sesuatu buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang dengan sengaja dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan pengertian sampah ialah sesuatu yang sudah tidak diinginkan atau tidak dipakai lagi akibat dari suatu proses aktivitas manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Sampah sebagai residu aktivitas kehidupan tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikurangi dan dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak *negative* yang lebih besar bagi keberlangsungan makhluk hidup yang didalamnya termasuk manusia.

Sampah berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ialah jenis sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang sifatnya *biodegradable* atau dapat diuraikan melalui aktivitas mikroorganisme. Sampah jenis ini menjadi penyumbang terbanyak dalam sampah rumah tangga, contohnya sampah sisa makanan, daun dan sebagainya. Sementara sampah anorganik merupakan jenis sampah yang timbul akibat bahan-bahan non hayati, yang berasal dari produk sintetik maupun bahan tambang yang bersifat *nonbiodegradable* atau tidak dapat terurai secara alami/ mikroorganisme dan atau dapat diuraikan tetapi butuh waktu yang sangat lama bahkan hingga ratusan tahun, contohnya palstik, pecah-belah, logam, abu dan sebagainya.

Sampah berdasarkan sumbernya digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu (Damanhuri, 2010) :

- a. Sampah rumah tangga yaitu sampah yang pada umumnya berupa sampah organik dan anorganik sebagai hasil aktivitas rumah tangga, seperti sampah dapur, sampah alat-alat rumah tangga, sampah taman, dan sebagainya.

- b. Sampah daerah komersial, merupakan hasil sampah dari pasar, restoran, perkantoran, perhotelan dan sebagainya seperti sampah pembungkus makanan, kertas, dan lain-lain.
- c. Sampah institusi, yaitu hasil sampah dari pemerintahan, sekolah, maupun rumah sakit seperti sampah medis, kertas, alat tulis.
- d. Sampah industri, yaitu hasil sampah dari aktivitas industri mulai dari proses pengolahan hingga menjadi suatu produk.
- e. Sampah fasilitas umum, yaitu sampah dari fasilitas umum seperti sampah di taman, pantai maupun tempat wisata.
- f. Sampah konstruksi bangun merupakan sampah dari sisa-sisa pembuatan gedung/ jalan, perbaikan maupun pembongkaran bangunan seperti pasir, semen, kaca, besi dan sebagainya.
- g. Sampah hasil pengelolaan air buangan maupun hasil *incinerator* seperti abu pembakaran.
- h. Sampah pertanian, yaitu hasil sampah dari sisa pertanian seperti jerami, ampas temu, sekam, pestisida dan sebagainya.

1.5.5 Pengelolaan Sampah

Kuncoro Sejati (2009:12) berpendapat bahwa sampah merupakan suatu material yang telah dibuang ataupun terbuang sebagai hasil dari aktivitas makhluk hidup (baik manusia, hewan dan alam) dan tidak dapat dipakai kembali karena fungsi utamanya telah diambil. Pengelolaan sampah ialah aktivitas pengumpulan, pengangkutan, proses daur ulang dan atau pembuangan material sampah (Subarna dalam Afirin, 2017:33). Pengelolaan sampah diartikan sebagai suatu pengetahuan

mengenai bagaimana sampah dihasilkan, disimpan, dikumpulkan, diangkut, diolah dan dibuang berdasar pada prinsip-prinsip kesehatan serta teknik pelestarian lingkungan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008, telah mengartikan pengelolaan sampah sebagai suatu kegiatan sistematis yang menyeluruh dan berkesinambungan meliputi kegiatan pengurangan (*waste minimization*) dan penanganan sampah (*waste handling*). Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa pengurangan sampah meliputi aktifitas pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang, dan daur-ulang (3R). Sedangkan penanganan sampah meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir. Pertama pemilahan sampah yaitu aktivitas memisahkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, maupun sifatnya. Kedua pengumpulan yaitu upaya pemungutan dan pemindahan sampah dari sumbernya menuju TPS maupun tempat penampungan sampah lainnya. Ketiga pengangkutan yaitu kegiatan membawa sampah baik yang berasal dari TPS maupun tempat pengelolaan sampah terpadu menuju TPA. Keempat pengolahan sampah yaitu usaha mengubah atau mengkonversi karakteristik, komposisi, maupun kuantitas sampah. Kelima pemrosesan akhir sampah yaitu kegiatan paling akhir dimana sampah-sampah hasil sisa pengelolaan dikembalikan secara aman ke media lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah ialah proses yang sistematis untuk mengurangi dan menangani sampah menjadi bentuk lain

sehingga memiliki nilai guna untuk dimanfaatkan kembali dan dapat mengurangi dampak *negative* bagi lingkungan.

1.5.6 Bank Sampah

Perlindungan lingkungan hidup adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang wajib dijaga kelestariannya. Perlindungan terhadap lingkungan hidup sebenarnya telah banyak diatur dalam nilai dan norma kehidupan bermasyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun seringkali pola perlindungan lingkungan sering kali belum berjalan secara efektif dalam masyarakat. Maka dibutuhkan suatu pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan khususnya dalam persampahan salah satunya dengan keberadaan bank sampah.

Wasted bank atau bank sampah merupakan bentuk pengelolaan sampah yang pertama kali dibina di Yogyakarta dan sampai saat ini telah diadopsi oleh berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan Permen LH Nomer 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah telah mendefinisikan bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*), sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau pemerintah daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan bank sampah merupakan rekayasa sosial dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada aktivitas memilah sampah berdasarkan jenisnya. Bank sampah ialah suatu strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangun rasa kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah agar

sampah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Unilever (2014) berpendapat bahwa bank sampah ialah sistem pengolahan sampah kering secara bersama dengan cara mengupayakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Sistem pengelolaan ini nantinya akan memilah, menampung, serta mendistribusikan sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan menabung sampah. Model pengelolaan sampah dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam rangka mengurangi timbulan sampah menjadi keputusan yang baik untuk mengurangi laju pertumbuhan timbulan sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk (Nugraha, dkk dalam Aniq 2019:37).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank sampah ialah upaya pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan memilah sampah sesuai jenisnya serta dapat memberikan manfaat ekonomis bagi anggotanya maupun nasabahnya.

1.5.7 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang artinya pengambilan peran atau bagian. Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Notoatmodjo (2007) adalah keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan segala persoalan yang terjadi di lingkup masyarakat itu sendiri. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk memberikan suatu kontribusi.

Kontribusi ini dapat berupa kontribusi dalam pemikiran/ide, finansial, tenaga/daya yang diwujudkan dalam 4M yaitu *man power, money, material, dan mind*.

Menurut Yuliana (2019) partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan warga masyarakat secara sukarela dalam proses persiapan, pelaksanaan dan monitoring pada suatu kegiatan atau program. Nugraha (2018), menambahkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan strategi kebijakan, ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan serta memetik hasil dan manfaat secara merata.

Cohen dan Uphoff (1980) mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam partisipasi pembangunan yang perlu diperhatikan yaitu partisipasi seperti apa yang terjadi (bentuk partisipasi), siapa saja yang berpartisipasi dan bagaimana partisipasi berlangsung. Secara lebih lanjut Cohen dan Uphoff membagi bentuk partisipasi kedalam 4 tahapan partisipasi, sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan atau *decision making*. Partisipasi pada tahap ini berpusat pada penciptaan ide, perumusan dan penilaian opsi, penentuan pilihan-pilihan yang ada serta perumusan rencana untuk menerapkan opsi yang dipilih. Terdapat tiga bentuk keputusan yaitu keputusan awal (*initial decisions*), keputusan yang sedang berlangsung (*ongoing decisions*) dan keputusan operasional (*operational decisions*).
2. Tahap implementasi atau *implementation*. Pada tahap ini terdapat 3 cara utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu kontribusi sumber daya (seperti penyediaan tenaga, uang tunai, barang dan informasi), partisipasi dalam administrasi dan koordinasi (seperti keikutsertaan sebagai karyawan atau

anggota asosiasi sukarela yang berperan melakukan administrasi dan mengkoordinasikan kegiatan) serta partisipasi pada kegiatan pendaftaran program.

3. Tahap pemanfaatan hasil. Terdapat tiga bentuk manfaat yang mungkin diperoleh masyarakat pada pendaftaran suatu program, yaitu materi (seperti peningkatan konsumsi, pendapatan atau aset), sosial (seperti peningkatan layanan dan fasilitas publik) dan pribadi (seperti harga diri, kekuatan politik, dan rasa kemanjuran). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil menjadi salah satu jenis partisipasi yang lebih pasif. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi bahaya yang dapat mengikuti dari partisipasinya.
4. Tahap evaluasi atau *evaluation* terbagi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung melalui kegiatan politik partisipatif, kegiatan lobi melalui beberapa organisasi atau menggunakan media tertentu untuk mengkomunikasikan pandangan masyarakat pada suatu program.

Sejalan dengan hal diatas, Levis (1996) mengemukakan bahwa analisis partisipasi masyarakat menjadi penting guna menghasilkan pembangunan yang optimal dengan melihat empat tahapan, yaitu: (1) tahap menumbuhkan ide untuk membangun dan perencanaan, (2) tahap pengambilan keputusan, (3) tahap pelaksana dan evaluasi, serta (4) pembagian keuntungan ekonomis.

Sedangkan Arnstein (dalam Muluk, 2007), mendefinisikan partisipasi warga Negara sebagai redistribusi kekuasaan yang memungkinkan warga Negara untuk ikut mengambil bagian dalam proses kebijakan dalam rangka mendorong reformasi sosial yang memungkinkan mereka untuk berbagi manfaat dengan

masyarakat makmur. Dalam hal ini Arnstein mengelompokkan partisipasi menjadi tiga tingkatan yaitu *non-participation*, *tokenism* dan *citizen power*. Pada tingkatan terendah yaitu non-partisipasi terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Partisipasi masyarakat pada tingkat ini hanya sebagai sarana penguasa untuk sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan, bukan untuk mendukung masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pada tingkatan ini terjadi distorsi atau penyimpangan informasi sehingga masyarakat tidak memiliki keterangan yang benar dan transparan dalam mengambil keputusan. Alhasil partisipasi yang diberikan tidak mencerminkan aspirasi yang nyata dari masyarakat.

Tingkatan kedua, yaitu menunjukkan adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan masyarakat pada tingkat ini terlihat dari adanya aktivitas dialog publik dimana masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan. Terdapat tiga anak tangga pada tingkatan ini yaitu pemberitahuan (*Informing*), konsultasi (*consultation*), penentraman (*placation*). Anak tangga pemberitahuan menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak berwenang kepada masyarakat seperti memberikan pengumuman, sosialisasi, penyebaran pamflet, maupun laporan tahunan. Pada anak tangga ini kadar partisipasi masyarakat masih lemah. Anak tangga konsultasi menunjukkan adanya komunikasi yang sudah terjadi secara dua arah seperti survey tentang sikap masyarakat, temu warga dan dengar pendapat publik. Dan anak tangga penentraman menunjukkan aktivitas partisipasi masyarakat yang lebih dalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam

komite pembuatan kebijakan, akan tetapi pemegang kuasa tetap memiliki porsi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Tingkatan tertinggi yaitu *citizen power* terdapat tiga anak tangga yaitu kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan kontrol masyarakat (*citizen control*). Pada anak tangga kemitraan, mekanisme partisipasi terlihat lebih nyata, dimana terdapat redistribusi kekuasaan melalui negosiasi antara pemegang kuasa dengan masyarakat untuk menciptakan keputusan bersama. Anak tangga pendelegasian kekuasaan menunjukkan adanya penyerahan sebagian kewenangan dari pihak berwenang kepada masyarakat. Dan anak tangga kontrol/kendali masyarakat menunjukkan adanya kekuasaan bagi masyarakat untuk menentukan keputusan atau kebijakan tertentu. Berikut merupakan tingkatan atau derajat partisipasi menurut Arntstein.

Tabel 1. 3 Tingkatan Partisipasi

No	Tingkat/Tangga Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	<i>Manipulation</i>	Permainan oleh pemerintah	<i>Non-participation</i> (Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek)
2.	<i>Therapy</i>	Sekedar agar masyarakat tidak marah	
3.	<i>Informing</i>	Pemberitahuan searah	Tokenism/sekedar formalitas
4.	<i>Consultation</i>	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu diterima sarannya	
5.	<i>Placation</i>	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	<i>Partnership</i>	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada pada masyarakat

7.	<i>Delegated Power</i>	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	<i>(Citizen Power)</i>
8.	<i>Citizen Control</i>	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: Arnstein (dalam Muluk, 2007)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pemecahan permasalahan tertentu yang dapat dilihat dari bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi serta tingkat partisipasi yang meliputi *non-participation (manipulation dan therapy)*, *tokenism (informing, consultation, dan placation)*, dan *citizen power (partnership, delegated power dan citizen control)*.

1.5.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan maupun kegagalan suatu program antara lain yaitu (Angell dalam Firmansyah, 2009):

1. Usia

Usia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam berpartisipasi pada kegiatan kemasyarakatan. Umumnya kelompok masyarakat yang usia menengah ke atas mempunyai keterikatan moral yang lebih pada nilai dan norma dilingkungannya sehingga kecenderungan untuk berpartisipasi lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Terdapat kecenderungan partisipasi berbeda yang diberikan antara perempuan dan pria. Hal ini disebabkan karena nilai sosial yang sudah terbentuk di masyarakat sejak dulu. Sistem sosial ini menyebabkan perbedaan derajat dan kedudukan yang berdampak pada perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan pria tidak terkecuali pada tingkat partisipasinya.

3. Pendidikan

Salah satu syarat utama untuk berpartisipasi ialah pendidikan. Pendidikan seseorang erat kaitanya dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku hidup seseorang di dalam lingkungannya. Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang tentu wawasan yang dimiliki akan semakin luas. Faktor pendidikan merupakan hal yang penting sebab melalui pendidikan seseorang dapat lebih mudah ketika berkomunikasi dengan orang lain, serta dapat lebih *responsive* terhadap sesuatu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Penghasilan merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari pekerjaan yang dimiliki. Pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang untuk turut berpartisipasi pada kegiatan kemasyarakatan. Dengan kata lain partisipasi akan muncul apabila didukung dengan kondisi ekonomi yang mencukupi.

5. Lamanya Tinggal

Seseorang yang lamanya bertempat tinggal di lingkungan tertentu akan lebih berpengalaman untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya dan berpengaruh terhadap partisipasi yang akan diberikan. Semakin lama seseorang tinggal maka akan timbul rasa saling memiliki terhadap lingkungan sehingga memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam setiap kegiatan lingkungan yang ada.

Saputro secara lebih dalam mengidentifikasi faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam program bank sampah meliputi adanya manfaat atau insentif yang diterima masyarakat, ajakan teman atau tetangga, petugas atau pengelola bank sampah yang ramah, sistem menabung sampah yang mudah dan proaktif, dan tersedianya sarana prasarana. Sedangkan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat meliputi adanya persaingan industri pengelolaan sampah, dan SDM pengelola yang kurang memadai (dalam Amalia, 2020:313). Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat menurut Pamilutseh (2020) adalah tingkat pendidikan nonformal, dukungan pemerintah, pengadaan sarana dan prasarana, serta perolehan insentif.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu masyarakat.

Faktor internal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah meliputi pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta lama tinggal.

- b. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu masyarakat. Faktor eksternal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana; dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, pengelola bank sampah (SDM, dan metode pelayanan bank sampah), serta insentif.

1.5.9 Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Menurut Notoatmodjo (2010) terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau menumbuhkan partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dengan paksaan yaitu cara meningkatkan partisipasi dengan memaksa masyarakat untuk ikut terlibat pada suatu kegiatan atau program tertentu melalui suatu peraturan perundang-undangan, peraturan daerah/ peraturan lainnya maupun perintah secara lisan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki pengaruh. Hasil dari metode ini akan lebih cepat dan praktis namun disisi lain menimbulkan rasa takut, kaget dan tertekan pada masyarakat. Akibatnya rasa memiliki terhadap suatu kegiatan atau program yang dijalankan tidak akan muncul.
- 2) Partisipasi dengan persuasi yaitu perwujudan partisipasi yang dilakukan dengan dasar kesadaran pada setiap individu dalam masyarakat. Hasil partisipasi melalui cara ini akan membutuhkan waktu yang *relative* lama namun apabila hasilnya sudah tercapai akan tumbuh rasa saling memiliki

dan memelihara yang akan bertahan lebih lama bahkan dapat berkelanjutan.

- 3) Partisipasi dengan edukasi yaitu partisipasi masyarakat yang ditumbuhkan melalui pendidikan, pemahaman baik secara formal maupun informal.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan penjabaran dari konsep atau variable penelitian dalam sebuah rincian yang terukur. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan untuk membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta upaya untuk meningkatkan partisipasinya.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam pemecahan permasalahan tertentu yang dapat dilihat dari bentuk dan tingkat partisipasinya. Konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah ini diteliti menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Uphoff dan Cohen (1980) dan teori derajat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) sebagai berikut.

- a. Bentuk partisipasi masyarakat. Fenomena yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi bentuk partisipasi pada tahapan berikut ini:
 - a) Tahap pengambilan keputusan meliputi bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan awal, sedang berlangsung, dan operasional.

- b) Tahap implementasi meliputi kontribusi sumber daya, partisipasi dalam administrasi dan koordinasi dan pendaftaran program.
 - c) Tahap pemanfaatan hasil meliputi manfaat material, sosial dan pribadi.
 - d) Tahap evaluasi meliputi bentuk evaluasi secara langsung dan tidak langsung.
- b. Tingkat/Derajat Partisipasi Masyarakat. Fenomena yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi:
- a) *Non-participation* meliputi *manipulation* dan *therapy*.
 - b) *Tokenism* meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
 - c) *Citizen power* meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Fenomena yang akan dilihat pada penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu:
- a. Faktor internal meliputi pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan.
 - b. Faktor eksternal meliputi sarana prasarana, dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, pengelola (SDM) bank sampah, serta insentif.

3. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun fenomena yang akan dilihat pada penelitian ini meliputi
 - a. Partisipasi dengan paksaan melalui peraturan maupun perintah secara lisan oleh pihak yang berwenang dan memiliki pengaruh.
 - b. Partisipasi dengan persuasi melalui kesadaran masyarakat.
 - c. Partisipasi dengan edukasi melalui pendidikan, pemahaman baik secara formal maupun informal.

1.7 Argumen Penelitian

Pengelolaan sampah dewasa ini menjadi agenda penting dalam rangka menyikapi permasalahan sampah yang terus meningkat. Upaya pengelolaan sampah salah satunya diwujudkan melalui bank sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Adapun salah satu bank sampah di Kabupaten Semarang adalah Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari, namun partisipasi masyarakatnya terindikasi masih rendah. Hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi masih rendah. Partisipasi masyarakat ini erat kaitannya dengan faktor pendorong dan penghambat yang berasal dari internal (yaitu pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan) dan faktor eksternal (yaitu sarana prasarana, dukungan dari pemerintah maupun tokoh masyarakat, pengelola/SDM bank sampah serta insentif) serta upaya-upaya apa saja telah dilakukan untuk meningkatkannya baik upaya paksaan, persuasi dan edukasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mana mencoba memberikan gambaran (mendeskripsikan) suatu fenomena penelitian. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dengan peneliti itu sendiri sebagai alat utama yang berperan dalam proses penelitian (Sugiyono, 2012:15). Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan tujuan menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi. Pemakaian metode kualitatif adalah bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam sehingga dapat mengungkap informasi secara lebih teliti dalam prosesnya yang deskriptif-analisis dan penuh makna. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, pendapat, keterangan maupun konsep tertentu yang dapat menjelaskan persoalan berkaitan dengan penelitian.

Penelitian deskriptif adalah studi yang berpusat pada penemuan fakta atau keadaan sebenarnya melalui interpretasi ilmiah (Anggito dan Setiawan, 2018:10). Metode deskriptif dirancang untuk menghimpun informasi secara konkrit dan rinci untuk mengidentifikasi permasalahan serta memperoleh hasil berupa kesimpulan.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ialah lokasi dimana objek penelitian dapat ditemukan. Situs pada penelitian ini yaitu Bank Sampah Apik Amanah yang berada di RW 05

Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan fokus dan lokus tentang permasalahan penelitian yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang penting pada suatu penelitian. Subjek penelitian yaitu orang atau informan yang diperlukan untuk memberikan berbagai informasi mengenai kondisi dan situasi pada latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki posisi terbaik dan paling mengetahui dan memahami terkait permasalahan. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh informan kunci yang akan menjadi narasumber penelitian. Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

1. DLH Kabupaten Semarang meliputi:
 - a. Kepala Sie Pengembangan Kelembagaan dan SDM LH.
 - b. Tenaga Faslitator Bank Sampah.
2. Kelurahan Langensari
3. Masyarakat meliputi:
 - a. Ketua RW 05 Kelurahan Langensari
 - b. Pengelola Bank Sampah Apik Amanah
 - c. Nasabah Bank Sampah Apik Amanah

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai berdasarkan metode penelitian yang telah dipilih yaitu data kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, frasa-frasa, simbol-simbol tertentu serta fakta-fakta yang dapat merepresentasikan atau menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang serta peristiwa-peristiwa sosial lainnya khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah.

1.8.5. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari kata-kata, perilaku/tindakan, sedangkan sumber data yang berasal dari dokumen, laporan dan lain sebagainya menjadi data pendukung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data ini diperoleh melalui informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik dari pengamatan secara langsung maupun dari hasil *in depth interview* atau wawancara mendalam antara peneliti dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari, Kabupaten Semarang. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dengan cara observasi pada lokasi penelitian yaitu Bank Sampah Apik Amanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Umumnya data ini diperoleh dari berbagai arsip, dokumen, jurnal, artikel dan informasi baik itu media elektronik ataupun media cetak. Sumber bacaan pada penelitian ini yaitu semua hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah dan beberapa bacaan lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan fundamental pada penelitian, dimana peneliti berusaha mengumpulkan berbagai data sebanyak mungkin untuk kemudian diproses menjadi sebuah informasi yang berguna untuk penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui aktivitas tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber dengan atau tanpa memakai *interview guide*/ pedoman wawancara (Sugiyono, 2012). Wawancara bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi yang nantinya dapat dipakai untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) terhadap subjek penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari, Kabupaten Semarang.

2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan dari sisi peneliti melalui panca indra. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian tanpa melakukan komunikasi (Sugiyono, 2012). Teknik ini mempunyai dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan pengumpulan data dimana peneliti merasakan atau ikut dalam kegiatan yang akan diamatinya sedangkan observasi non-partisipan adalah pengumpulan data dimana peneliti hanya melakukan pengamatan biasa saja tanpa ikut serta dalam objek yang diamatinya. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi non-partisipan secara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian-kejadian lalu yang berupa tulisan, gambar, maupun hasil karya tertentu (Sugiyono, 2012:82). Pada penelitian kualitatif, studi dokumen digunakan sebagai pendukung data dari teknik pengumpulan data sebelumnya (wawancara dan observasi). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa dokumen, arsip maupun laporan yang belum didapatkan dari metode sebelumnya untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai tambahan bukti atas suatu peristiwa. Pengambilan data juga dilakukan dengan mengambil foto-foto di lokasi penelitian.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian kualitatif mulai dilakukan sebelum, saat dan setelah pengumpulan data dilapangan. Analisis data kualitatif merupakan usaha

yang dilakukan peneliti melalui pengelolaan data untuk menemukan pola tertentu maupun hal penting lainnya yang nantinya akan dipaparkan dalam hasil penelitian (Moleong, 2008:248). Jadi dari data-data penelitian yang didapat melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi perlu dikelola sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembacannya.

Miles dan Huberman menjelaskan konsep berkaitan dengan jenis kegiatan dalam analisis data (dalam Sugiyono, 2012) yang meliputi:

1. Reduksi data

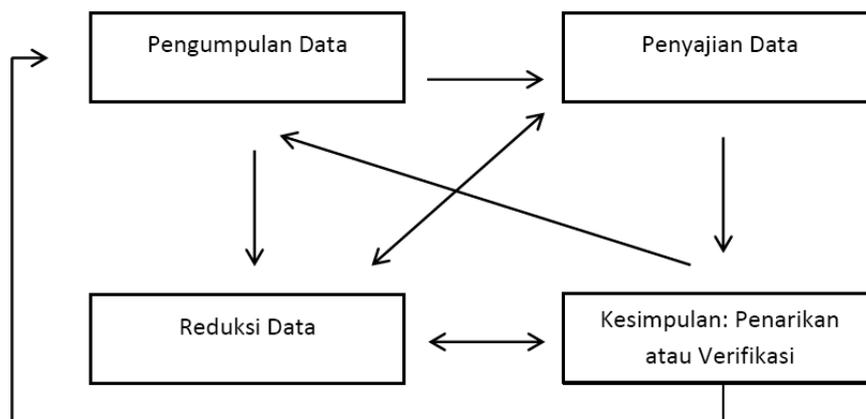
Reduksi data adalah suatu kegiatan analisis yang bermaksud mendalami, memfokuskan, menentukan, menyusun data sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian. Pada tahap reduksi data, data yang didapatkan dari tempat penelitian, selanjutnya dimasukan pada uraian laporan penelitian secara lengkap dan rinci. Reduksi data ini dilakukan secara berkesinambungan hingga berakhirnya laporan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan hasil penelitian dari kumpulan data yang telah diperoleh agar mudah dimengerti dan dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui penjelasan berupa teks, bagan, *flowchart*, pola hubungan tertentu dan sebagainya. Kegiatan analisis data memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami kondisi terjadi serta memudahkan dalam perencanaan kerja selanjutnya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan menjadi tahapan terakhir pada kegiatan analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menemukan informasi yang bermakna bagi hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan.



Gambar 1. 10 Analisis Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012)

1.8.8. Kualitas Data

Proses kerja ilmiah haruslah melewati uji coba untuk mendapatkan data sesuai dengan realitas di lapangan. Pada penelitian kualitatif untuk menguji kualitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengecek keabsahan data dengan pemanfaatan beberapa teknik pengumpulan data lainnya sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Pengujian kualitas data menggunakan triangulasi menjadi hal penting dalam penelitian kualitatif, walaupun akan membutuhkan waktu, tenaga serta biaya yang lebih. Melalui triangulasi akan meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti mengenai

fenomena yang akan diteliti. Pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012: 274) dilakukan melalui cara berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas melalui pengujian yang berulang melewati berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu pengujian data yang menggunakan pengumpulan data berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Misalnya apakah data yang dihasilkan melalui wawancara sudah sesuai dengan data dari observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu yaitu pengujian data yang diperoleh dari waktu yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara orang yang sama namun dengan waktu yang berbeda.

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik untuk menarik kesimpulan dari data penelitian.